

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

Muhammad Mahardika

NPP. 31.0179

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: m.mahardika97@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Drs. Herry Soesanto, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Poverty is one of the main problems faced by Sagulung Sub-district, Batam City. The high poverty rate in this area demands effective policy intervention from the government. The Family Hope Program (PKH) is one of the social assistance programs that aims to reduce poverty and improve the quality of life of the poor. **Purpose:** This study aims to evaluate the implementation of PKH in Sagulung Sub-district and its impact on poverty reduction. The focus of this research is to identify the extent to which the program has been effective in achieving its goals. **Method:** the method used in this research is descriptive qualitative with the help of Van Metern Van Horn's implementation theory with the dimensions of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, dispositional attitudes, inter-organizational communication and supporting external conditions. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation with informants from several parties from the batam city social service, the sub-district and other organizations that help. **Results:** The results showed that the implementation of PKH in Sagulung sub-district was effective in reducing poverty. Beneficiaries experience increased income and better access to health and education services. However, some obstacles such as the lack of human resources for the Family Hope Program. **Conclusion:** The implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sagulung Sub-district, Batam City has been running well. However, there are some obstacles that interfere with the effectiveness of this program, such as the lack of human resources and budget, as well as the existence of unsupportive external factors. To overcome these obstacles, it is necessary to add optimal and competent human resources and provide intensive allowances to the assistants. With additional qualified resources and adequate allowances, it is expected that this program can run more optimally. In addition, direct control of the beneficiary community is needed to ensure the effectiveness of the program.

Keywords: Implementation, family hope program, poverty rate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Tingginya angka kemiskinan di daerah ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang efektif dari pemerintah. Program Keluarga Harapan

(PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi PKH di Kecamatan Sagulung dan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana program tersebut telah efektif dalam mencapai tujuannya. **Metode:** metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dibantu dengan teori implementasi Van metern Van Horn dengan dimensi standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap disposisi, komunikasi antar organisasi dan kondisi eksternal yang mendukung Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan beberapa pihak dari dinas sosial kota batam, pihak kecamatan dan organisasi lain yang turut membantu **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Sagulung cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia Program Keluarga harapan. **Kesimpulan:** Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sagulung, Kota Batam telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas program ini, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya faktor eksternal yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penambahan sumber daya manusia yang optimal dan kompeten serta pemberian tunjangan intensif kepada para pendamping. Dengan adanya tambahan sumber daya yang berkualitas dan tunjangan yang memadai, diharapkan program ini dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, diperlukan kontrol langsung terhadap masyarakat penerima manfaat untuk memastikan efektivitas program.

Kata Kunci: Implementasi , program keluarga harapan, angka kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Menurut salah satu ahli kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1995). Kemiskinan adalah masalah global yang juga dihadapi Indonesia dengan tingkat penduduk miskin yang tinggi.

Jenis kemiskinan berdasarkan pola waktunya meliputi kemiskinan kronis atau turun-temurun yang dikenal sebagai persistent poverty, yang sering terjadi di daerah dengan sumber daya alam kritis atau terisolasi. Cyclical poverty adalah kemiskinan yang mengikuti siklus ekonomi, sementara seasonal poverty adalah kemiskinan musiman yang sering dialami oleh nelayan dan petani. Terakhir, accidental poverty adalah kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan termasuk perbedaan kualitas pendidikan, kesenjangan ekonomi, kurangnya akses pekerjaan layak, kondisi kesehatan buruk, krisis ekonomi, dan konflik. Pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pemerintah melakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah langkah nyata untuk mengurangi kemiskinan.

PKH adalah program bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dimulai pada tahun 2007, PKH bertujuan meningkatkan akses dan pemanfaatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, dan perawatan. Bantuan ini disalurkan nontunai secara bertahap setiap tiga bulan sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, sasaran PKH adalah keluarga miskin di wilayah pesisir, pulau kecil, daerah tertinggal, dan perbatasan antar negara yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, serta sosial. Keluarga penerima juga diwajibkan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk memperkuat perubahan perilaku dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

Tujuan utama dari P2K2 adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki kualitas hidup di masa depan. Kegiatan ini wajib diikuti setiap bulan. Kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakan program ini sejak tahun 2010, menyusul dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Tabel 1.1

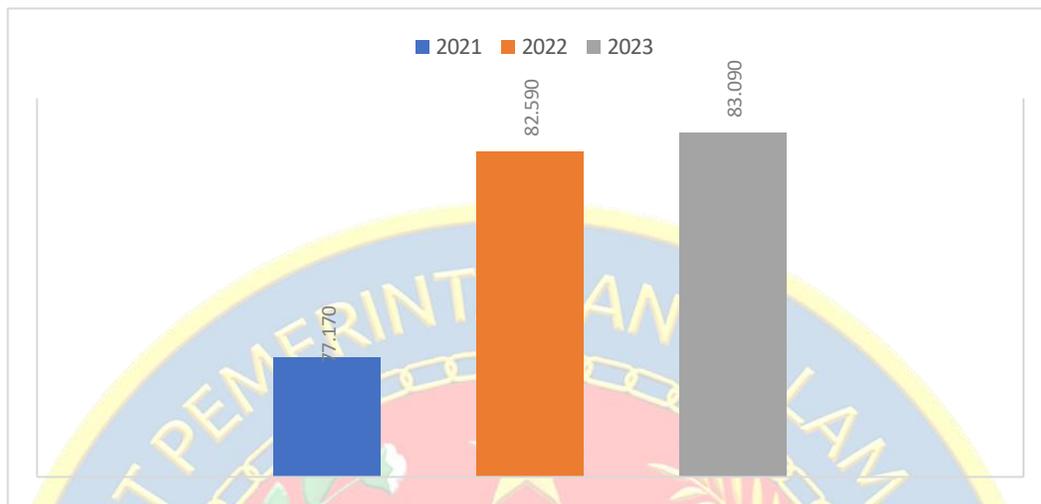
Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten /Kota	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
1.	Karimun	14,33
2.	Bintan	9,86
3.	Natuna	4,30
4.	Lingga	10,18
5.	Anambas	3,08
6.	Batam	83,09
7.	Tanjungpinang	17,67

Sumber: BPS Kota Batam, di olah oleh penulis, 2023

Akan tetapi jumlah penduduk miskin kota Batam terus mengalami peningkatan berdasarkan data dari Badan pusat statistik kota Batam, Kota Batam memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu mencapai 83.090 jiwa.

Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin Di kota Batam Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Batam, 2023

Bagan diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin dikota batam terus meningkat,pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin dikota batam sebanyak 77.170 orang ditahun 2022 meningkat menjadi 82.590 orang dan ditahun 2023 sebanyak 83.090 orang, diperlukan penelusuran terkait apa yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Batam terus meningkat,tinggi nya jumlah kemiskinan dikota batam dibutuhkan adanya penanganan langsung dari pemerintah terkait permasalahan tersebut

Tabel 2
Jumlah Keluarga Miskin Di Kota Batam

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin di Kota Batam
1.	BATAM KOTA	14.189
2.	BATU AJI	13.720
3.	BATU AMPAR	8.588
4.	BELAKANG PADANG	4.941
5.	BENGGONG	12.939
6.	BULANG	3.053
7.	GALANG	4.612
8.	LUBUK BAJA	11.333
9.	NONGSA	9.823
10.	SAGULUNG	26.525
11.	SEI BEDUK	11.333
12.	SEKUPANG	15.020

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam,diolah oleh penulis,2023

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sagulung merupakan salah satu dari dua belas kecamatan di Kota Batam, seluruh kecamatan di Kota Batam telah melaksanakan program ini akan tetapi Kecamatan sagulung memiliki tingkat keluarga miskin tertinggi di kota batam, terdapat 26.525 keluarga miskin yang terdapat dikecamatan ini akan tetapi hanya terdapat 3.691 keluarga ditahun 2023

Tabel 3

Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2021- 2023 Di Kota Batam

No	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	BATAM KOTA	1445	1333	1319
2.	BATU AJI	2374	1701	2046
3.	BATU AMPAR	1814	1723	1688
4.	BELAKANG PADANG	1815	1729	1776
5.	BENGGONG	1561	1465	1542
6.	BULANG	1605	1437	1360
7.	GALANG	1439	1385	1360
8.	LUBUK BAJA	1844	1767	1755
9.	NONGSA	1419	1097	1439
10.	SAGULUNG	3675	3650	3691
11.	SEI BEDUK	1997	1770	1761
12.	SEKUPANG	2045	2008	2065
	Total	22457	21627	21802

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, diolah oleh penulis,2023

Table 3 diatas menunjukkan data jumlah penerima PKH dari tiga tahun terakhir disetiap kecamatan kota batam, terdapat 12 kecamatan dikota batam,kecamatan Sagulung merupakan kecamatan yang paling banyak menerima bantuan PKH dari kecamatan yang lain pada tahun 2021 sebanyak 3675 keluarga, 3650 keluarga dan di tahun 2023 sebanyak 3691 keluarga.

Dari wawancara dengan koordinator Program Keluarga Harapan di Kota Batam, terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Kota Batam. Masalah tersebut mencakup aspek organisasi, peserta, dan lingkungan.

Secara organisasi, ada keterbatasan dana yang mempengaruhi biaya fasilitator, materi, tempat, dan transportasi bagi peserta, mengingat jumlah peserta yang sangat banyak. Dari sisi peserta, kurangnya minat atau pemahaman tentang manfaat pertemuan menyebabkan partisipasi rendah. Tingkat pendidikan yang berbeda-beda di antara peserta juga menyulitkan penyampaian informasi yang relevan dan mudah dipahami, sehingga diperlukan berbagai gaya pembelajaran untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi.

Secara lingkungan, kesulitan akses ke tempat pertemuan atau fasilitas lain mengurangi partisipasi keluarga. Masalah-masalah ini membuat angka graduasi mandiri di Kecamatan Sagulung menjadi rendah, dan keluarga masih bergantung pada bantuan program tersebut. Meskipun selalu mendapat bantuan, banyak keluarga belum berhasil keluar dari zona kemiskinan.

Tabel 4
Jumlah keluarga yang Graduasi Mandiri tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Graduasi Mandiri
1.	BATAM KOTA	112
2.	BATU AJI	673
3.	BATU AMPAR	91
4.	BELAKANG PADANG	86
5.	BENGGONG	96
6.	BULANG	168
7.	GALANG	54
8.	LUBUK BAJA	77
9.	NONGSA	322
10.	SAGULUNG	25
11.	SEI BEDUK	227
12.	SEKUPANG	37
	Total	1.968

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, diolah oleh penulis,2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kecamatan Sagulung memiliki jumlah keluarga yang melakukan graduasi mandiri paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya, dengan hanya 25 keluarga yang menghentikan keikutsertaannya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat sehingga tidak lagi layak menerima bantuan sosial PKH. Ini menjadi masalah mengapa Kecamatan Sagulung memiliki tingkat graduasi mandiri terendah di Kota Batam.

Diharapkan, dengan dilaksanakannya PKH, beban keluarga miskin dapat berkurang dan program ini berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Sagulung. Program ini juga diharapkan dapat membuka wawasan KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. KPM diharapkan memanfaatkan bantuan PKH untuk menyekolahkan anak dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, sehingga kemiskinan di Kecamatan Sagulung dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat miskin meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh Cahyo Sasmito, berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan PKH oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu berjalan dengan baik dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Komunikasi antara Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan Peserta PKH berlangsung dengan efektif. Dinas Sosial aktif melibatkan Pendamping PKH dalam berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam implementasi PKH. Pendamping PKH juga ditugaskan untuk membantu Peserta PKH dalam memahami syarat dan ketentuan program (Cahyo, 2019)

Penelitian oleh Ni Made Oveta Annisya pada tahun 2023 berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam"

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketidaksesuaian identitas Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat di berbagai lembaga seperti DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur, yang berdampak pada proses penyaluran dana bantuan (Annisyah, 2023)

Penelitian oleh Khodiziah Isnaini Kholif pada tahun 2014 berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan (Kholif, 2014)

Penelitian oleh Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo pada tahun 2019 berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi di Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta PKH di Desa Beji menurun setiap tahunnya, dari 158 pada tahun 2007 menjadi 130 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PKH berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan (Virgoreta, 2019)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dalam menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Implementasi sendiri yaitu suatu system rekayasa (Nurdin, 2002). Menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mencakup dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap disposisi, komunikasi antar organisasi, dan kondisi eksternal pendukung (Agustino, 2016). Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data untuk memahami fenomena masyarakat, dengan fokus pada faktor-faktor lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan koordinasi antar-instansi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pada pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lingkungan dan sosial setempat, disajikan dalam bentuk data deskriptif dan pernyataan narasumber, didukung oleh observasi dan dokumentasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Ketika membicarakan penerapan program baik yang sifatnya sosial ataupun pendidikan, maka definisi implementasi yaitu suatu proses yang sangat penting sekali. Sedangkan definisi Implementasi program yaitu suatu langkah-langkah dari menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan program tersebut (Rohman, 2009). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama penerapan kebijakan tersebut. Penelitian

ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas program.

II. METODE

Menurut salah satu ahli desain penulisan adalah rencana penyelidikan yang terstruktur untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian (Silalahi, 2009). Penelitian, sebagai cara sistematis untuk mengumpulkan dan menyajikan data, dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tujuannya, yakni penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif (Martono, 2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menurut (Creswell, 2018), adalah metode untuk menggali dan memahami maksud dari individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, dimulai dari observasi khusus menuju pemahaman umum, dengan mengandalkan data seperti jurnal, transkrip, catatan lapangan, dan buku kode (Neuman, 2017). Metode kualitatif bersifat induktif yaitu diperoleh dari fakta, realita, gejala, masalah bersumber dari observasi khusus. Bersumber dari realita dan fakta di lapangan sehingga peneliti menggambarkan gambaran umum. Induktif berarti pemahaman yang dilakukan dari hal yang bersifat khusus ke (Raco, 2010). Metode ini dilakukan di lingkungan alami untuk memastikan data yang diperoleh alami dan tidak dimanipulasi (Fernandes, 2017). Tahap pengumpulan data sangat penting, menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara. Wawancara adalah inti dari sebagian besar desain penelitian kualitatif (Gray, 2017). Sedangkan menurut (Flick, 2014) wawancara adalah situasi sosial, dan secara inheren itu sendiri melibatkan hubungan antara pewawancara dan informan dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Ketua Koordinator PKH Kota Batam, Pendamping PKH Kecamatan Sagulung, Camat Sagulung, dan masyarakat KPM PKH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, termasuk tantangan yang dihadapi selama penerapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, yang mencakup dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap disposisi, komunikasi antar organisasi, dan kondisi eksternal yang mendukung.

3.1.1 Standar Tujuan kebijakan

Penulis menyimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dipahami dengan baik oleh para pendamping dan masyarakat setelah melalui proses sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Pemahaman ini diharapkan membantu para pelaksana program dan masyarakat peserta untuk mencapai tujuan program secara efektif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap, termasuk pemberian edukasi kepada masyarakat dan bantuan non-tunai, sehingga memudahkan mereka dalam merealisasikan program tersebut. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

3.1.2 Sumber Daya Kebijakan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sagulung mengalami kekurangan sumber daya, terutama sumber daya manusia, yang krusial untuk keberhasilan implementasi program. Kekurangan ini menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Selain sumber daya manusia, anggaran juga penting untuk menunjang kelancaran program, termasuk bantuan non-tunai dari Kementerian Sosial dan biaya operasional bagi pendamping. Data menunjukkan jumlah pendamping PKH di setiap kecamatan di Kota Batam masih kurang memadai.

Table 5
Jumlah pendamping PKH di Kota Batam

Kecamatan	Jumlah pendamping	Tahun
Batam Kota	7	2023
Batu Aji	5	2023
Sagulung	7	2023
Sekupang	8	2023
Nongsa	7	2023
Belakang Padang	8	2023
Bulang	7	2023
Galang	9	2023
Lubuk Baja	9	2023
Bengkong	8	2023
Batu Ampar	8	2023
Sei Beduk	8	2023
Koordinator	2	2023
Jumlah	93	

Dari data yang diperoleh, jumlah pendamping PKH di setiap kecamatan di Kota Batam sangat sedikit, hanya 1-2 pendamping per kelurahan dan satu koordinator per kecamatan, serta dua koordinator untuk seluruh Kota Batam. Di Kecamatan Sagulung, hanya terdapat 7 pendamping untuk 6 kelurahan, sehingga setiap kelurahan hanya memiliki satu pendamping.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) PKH di Kecamatan Sagulung masih kurang, selain juga kekurangan anggaran untuk kegiatan lapangan. Kekurangan ini mempengaruhi efektivitas program, karena pendamping kesulitan mengatur pertemuan dengan KPM PKH dan tidak ada anggaran tambahan untuk kegiatan lapangan.

Kesimpulannya, Dinas Sosial Kota Batam masih kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada efektivitas program. Penulis menyarankan agar Dinas Sosial Kota Batam mengevaluasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu untuk mencapai tujuan kebijakan PKH dengan lebih efektif.

3.1.3. Karakteristik Agen Pelaksana

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan mengatasi kemiskinan di Kota Batam. Dinas Sosial Kota Batam, sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Dalam wawancara pada 11 Januari 2024, Drs. Leo Putra, A.P., M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Batam, menyatakan bahwa tugas utama dinas sosial adalah menangani masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Program PKH, sebagai program nasional dari Kementerian Sosial, diimplementasikan di daerah oleh dinas sosial setempat, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.

Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menjalankan PKH sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi mereka, seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016

3.1.4. Sikap Kecenderungan (Disposisi)

Sikap disposisi dari agen pelaksana, berupa penerimaan atau penolakan, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang tidak melibatkan masukan dari warga setempat dan diterapkan secara top-down seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara pada 11 Januari 2024, Yahya, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam, menyatakan bahwa para pendamping selalu siap menjalankan tugas, memberikan bantuan, dan edukasi kepada masyarakat, meskipun jumlah pendamping terbatas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam, sebagai agen pelaksana PKH, memahami dan menjalankan kebijakan dengan baik. Para pendamping memahami tugas mereka dan siap membantu masyarakat, sesuai dengan agenda yang disusun oleh Kementerian Sosial. Observasi penulis mengonfirmasi bahwa pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana pusat.

3.1.5. Komunikasi Antar Organisasi

Analisis terhadap kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Implementasi kebijakan akan efektif jika tujuan dan ukuran-ukuran yang jelas dipahami oleh semua yang terlibat. Koordinasi yang baik antara dinas sosial, masyarakat, bank, dan unit administrasi lokal seperti RT/RW dan kecamatan sangat penting. Hal ini terlihat dari komunikasi yang baik antarpihak dalam Program Keluarga Harapan di Kota Batam, memastikan semua tahu apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Yahya, koordinator Program Keluarga Harapan Kota Batam, menjelaskan bahwa mereka berkoordinasi dengan bank untuk pembagian dana secara transparan kepada masyarakat. Mereka juga bekerja sama dengan

kelurahan, kecamatan, dan RT/RW untuk mendukung keluarga yang membutuhkan dan mengorganisir pertemuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Pihak Kecamatan Sagulung, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Hafiz, juga aktif berkoordinasi dengan para pendamping untuk pelaksanaan program ini, dengan rutin melaksanakan pertemuan untuk membahas agenda Program Keluarga Harapan.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Sosial Kota Batam, khususnya dalam Program Keluarga Harapan, berhasil menjalankan program dengan baik melalui kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam meminimalisir kesalahan, tetapi juga memungkinkan semua pihak untuk memiliki persepsi yang seragam dalam mencapai tujuan program. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan transparansi dalam implementasi kebijakan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara efektif.

3.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan eksternal. Lingkungan yang kondusif mendukung keberhasilan kegiatan, seperti yang terlihat dalam observasi saat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di fasilitas umum. Namun, fasilitas edukasi dinilai masih kurang karena pengajaran hanya menggunakan selebaran poster tanpa sarana dan prasarana pendukung seperti alat tulis atau media pembelajaran lainnya. Dalam hal dukungan politik, Koordinator PKH Kota Batam, Bapak Yahya, menyebutkan bahwa kegiatan program diatur dari pusat, yang mengakibatkan kegiatan bisa berubah sesuai perubahan kebijakan nasional, meskipun implementasi di tingkat lokal mengikuti arahan pusat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sering terjadi perubahan kebijakan dari pusat yang berdampak pada kegiatan dan teknis implementasi Program Keluarga Harapan. Adaptasi terhadap perubahan ini menjadi tantangan bagi para pendamping. Perubahan yang sering dapat menghambat optimalisasi kegiatan dan mencapai tujuan kebijakan. Kurangnya pengawasan yang memadai dan kurangnya kontrol serius dapat membuat warga lebih tergantung pada bantuan finansial dan mengurangi motivasi untuk belajar atau mencapai kemandirian. Fokus pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga mungkin tidak cukup untuk mendorong motivasi yang berkelanjutan dalam mencapai kemandirian.

3.2 Diskusi Utama Penelitian

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai studi sebelumnya tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian Cahyo Sasmito menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Batu berhasil mengurangi kemiskinan dengan komunikasi yang baik antara Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Ni Made Oveta Annisya mengungkapkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya dimulai dengan beberapa kendala administratif yang mempengaruhi penyaluran dana. Vicky Apriadi menemukan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Parittiga belum maksimal karena banyak keluarga miskin belum menjadi penerima manfaat dan beberapa penerima belum memenuhi kewajiban mereka. Dyah Ayu Virgoreta mencatat penurunan jumlah peserta PKH di Desa Beji setiap tahun menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Rizki Fitria menilai implementasi PKH di Desa Mangkusip cukup baik berdasarkan aspek sumber daya.

Penelitian di Kecamatan Sagulung Kota Batam juga menunjukkan upaya signifikan dalam mengurangi kemiskinan dengan berbagai aktivitas pendukung, meskipun menghadapi tantangan administrasi dan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Secara keseluruhan, implementasi PKH di berbagai wilayah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dengan tantangan yang bervariasi.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi mengenai temuan utama penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menyoroti beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun program telah berjalan dengan cukup efektif, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perbaikan. Beberapa indikator yang perlu dibenahi antara lain kurangnya sumber daya manusia dalam program PKH, pendanaan yang tidak memadai bagi pendamping PKH, serta kebijakan prosedur yang sering berubah-ubah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Sosial Kota Batam berusaha meningkatkan efektivitas program PKH. Mereka telah mengajukan permintaan penambahan sumber daya manusia kepada Kementerian Sosial serta memberikan dana tambahan kepada pendamping PKH untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kendala yang ada dan meningkatkan manfaat program PKH bagi masyarakat di Kecamatan Sagulung.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sagulung, Kota Batam telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas program ini, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya faktor eksternal yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penambahan sumber daya manusia yang optimal dan kompeten serta pemberian tunjangan intensif kepada para pendamping. Dengan adanya tambahan sumber daya yang berkualitas dan tunjangan yang memadai, diharapkan program ini dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, diperlukan kontrol langsung terhadap masyarakat penerima manfaat untuk memastikan efektivitas program.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas oleh keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup kecamatan tertentu sehingga terbatas secara geografis dan temporal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan di masa mendatang akan dilakukan studi lanjutan yang menggali lebih dalam tentang implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Sagulung Kota Batam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Kepala Kepala Dinas Sosial Kota Batam dan semua pihak terkait atas dedikasi dan kerja keras dalam penelitian terkait implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi dasar keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Annisya, N. M. O., & Novira, A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 29-50.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta
- Flick, U. (2014). Mapping the Field. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Ltd. In *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446282243>
- Gray, M. (2017). Applied Qualitative Research Design: A Total Framework Approach. In *Nursing Standard* (Vol. 32, Issue 15). <https://doi.org/10.7748/ns.32.15.34.s28>
- Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada
- Neuman, W. L. (2017). *Understanding research second edition* (Vol. 32, Issue 5)
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Bandung: PT Refika Aditam
- Suparlan P. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Virgoreta, D. A. (2015). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

